

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: BPK Jawa Tengah

Ayub Amali Jabat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng

<https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/399989-Ayub-Amali-Jabat-Kepala-BPK-Perwakilan-Provinsi-Jateng>



Semarang, Gatra.com - Jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah diserahkan dari Hery Subowo kepada Ayub Amali. Upacara serah terima jabatan (sertijab) dilakukan di aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) di Jalan Perintis Kemerdekaan Semarang, Jumat (15/3). Acara tersebut dihadiri anggota V BPK RI Isma Yatun, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketua DPRD Provinsi Jateng Rukma Setyabudi, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jateng.

Pejabat lama, Hery Subowo, sejak Februari 2019 lalu menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI, di Jakarta. Sedangkan pejabat baru, Ayub Amali sebelumnya sebagai Kepala Auditorat Utama Keuangan Negara V.A BPK RI. Ayub Amali juga pernah menjabat sebagai Kepala Sub-auditorat di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Anggota V BPK RI Isma Yatun, dalam sambutannya mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang biasa di setiap lembaga, termasuk di BPK. Menurut dia mutasi dan promosi bertujuan agar proses pengembangan dan dinamisasi organisasi berlangsung dengan baik.

"Adanya mutasi dan promosi jabatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga dengan tetap berlandaskan nilai-nilai dasar BPK, yakni integritas, independensi, dan profesionalisme," kata Isma.

Meninggung pengelolaan keuangan daerah di wilayah Jateng, Isma mengatakan, dalam beberapa tahun ini telah tampak adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dari pemerintah-pemerintah daerah di Jateng. Salah satu indikasinya adalah opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang terus membaik dari tahun ke tahun.

"Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD di Jateng tahun anggaran 2017 lalu, dari 36 LKPD, 32 di antaranya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan empat LKPD mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP)," kata Isma.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, setiap komponen pengelolaan keuangan negara harus terus berbenah untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. "Setiap pengelola keuangan daerah harus berupaya mencapai WTP yang berkualitas," kata Ganjar.

Terkait pergantian pejabat BPK Perwakilan Jateng, Ganjar berharap, hal itu dapat semakin meningkatkan kerja sama antar lembaga yang selama ini sudah terbangun dengan baik.

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH